PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR : 14 TAHUN 2010

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT

Menimbang :

a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 6 Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2010, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten,

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan dalam suatu peraturan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Lingkungan Propinsi Sumatera Utara jo. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

9. Undang-Undang Nomor ...

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5049);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah tiga kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

22. Peraturan Pemerintah ...

22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

23. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;

26. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Barat dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat;

27. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Aceh Barat;

28. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Barat;

29. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 5 Tahun 2008 tentang Kecamatan;

30. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2010 Nomor 9);

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI ACEH BARAT TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN ANGGARAN 2010**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2010 semula berjumlah Rp 443.419.004.994,00 bertambah Rp 74.252.085.560,00 sehingga menjadi Rp 517.671.090.554,00 dengan rincian sebagai berikut :

1) Pendapatan Daerah

a. Semula	Rp 417.316.820.194,00
b. Bertambah	Rp 74.182.041.062,00
Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan	**Rp 491.498.861.256,00**

2) Belanja Daerah

a. Semula	Rp 443.419.004.994,00
b. Bertambah	Rp 74.252.085.560,00
Jumlah Belanja Setelah Perubahan	**Rp 517.671.090.554,00**
Surplus/ (Defisit) Setelah Perubahan	**Rp (26.172.229.298,00)**

3) Pembiayaan

A. Penerimaan Pembiyaan Daerah

a. Semula	Rp 47.377.184.800,00
b. Berkurang	Rp (20.175.043.754,00)
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan	**Rp 27.202.141.046,00**

B. Pengeluaran Pembiayaan ...

B. Pengeluaran Pembiyaan Daerah

a. Semula	Rp	21.275.000.000,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	(20.245.088.252,00)
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan	**Rp**	**1.029.911.748,00**
Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan	**Rp**	**26.172.229.298,00**
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan	**Rp**	**0,00**

Pasal 2

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten sebagaimana dimaksud pada pasal 1 dirinci lebih lanjut pada Lampiran Peraturan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana yang dimaksud pada pasal 2 di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati Aceh Barat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di : Meulaboh
Pada tanggal : 1 Desember 2010 M
24 Dzulhijjah 1431 H

BUPATI ACEH BARAT
WAKIL BUPATI

FUADRI

Diundangkan di : Meulaboh
Pada tanggal : 1 Desember 2010 M
24 Dzulhijjah 1431 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT

BANTA PUTEH, S.Sos, MM
Pembina Utama Muda
Nip. 19570520 198010 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT
TAHUN 2010 NOMOR

Lampiran I : Qanun Kabupaten Aceh Barat
Nomor : 9 Tahun 2010
Tanggal : 1 Desember 2010

KABUPATEN ACEH BARAT

RINGKASAN PERUBAHAN APBK
TAHUN ANGGARAN 2010

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp.)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
1.	PENDAPATAN DAERAH	417,316,820,194	491,498,861,256	74,182,041,062	17.77
1.1	**Pendapatan Asli Daerah**	28,682,963,747	27,748,148,683	(934,815,063)	(3.25)
1.1.1	Hasil Pajak Daerah	4,586,746,685	4,605,062,685	18,316,000	0.39
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	8,157,291,200	8,214,873,200	57,582,000	0.70
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	4,200,000,000	2,993,230,076	(1,206,769,923)	(28.73)
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	7,393,689,331	7,589,746,191	196,056,860	2.65
.5	Zakat	4,345,236,531	4,345,236,531	0	0.00
1.2	**Dana Perimbangan**	380,405,946,537	384,446,198,392	4,040,251,855	1.06
1.2.1	Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak	35,379,981,537	39,420,233,392	4,040,251,855	11.42
1.2.2	Dana alokasi umum	311,356,765,000	311,356,765,000	0	0.00
1.2.3	Dana alokasi khusus	33,669,200,000	33,669,200,000	0	0.00
1.3	**Lain-lain pendapatan daerah yang sah**	8,227,909,910	79,304,514,181	71,076,604,271	863.85
1.3.1	Pendapatan hibah	0	370,000,000	370,000,000	0.00
1.3.2	Dana darurat	0	0	0	0.00
1.3.3	Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintahan daerah lainnya	8,227,909,910	8,461,319,249	233,409,339	2.83
1.3.4	Dana penyesuaian dan otonomi khusus	0	70,473,194,932	70,473,194,932	0.00
1.3.5	Bantuan keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya	0	0	0	0.00
1.3.6	Dana Tunjangan dari pemerintah pusat	0	0	0	0.00
	JUMLAH PENDAPATAN	417,316,820,194	491,498,861,256	74,182,041,062	17.77
2.	BELANJA DAERAH	443,419,004,994	517,671,090,554	74,252,085,560	16.74
2.1	**Belanja Tidak Langsung**	314,200,552,112	333,798,305,825	19,597,753,713	6.23
2.1.1	Belanja pegawai	266,415,316,049	285,230,069,762	18,814,753,713	7.06
2.1.2	Belanja bunga	0	2,775,000,000	2,775,000,000	0.00
2.1.3	Belanja subsidi	0	0	0	0.00
2.1.4	Belanja hibah	3,975,000,000	4,250,000,000	275,000,000	6.91
2.1.5	Belanja bantuan sosial	9,290,236,063	10,568,236,063	1,278,000,000	13.75
2.1.6	Belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa	0	0	0	0.00
2.1.7	Belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/ kota dan pemerintahan desa	34,270,000,000	30,850,000,000	(3,420,000,000)	(9.97)
2.1.8	Belanja tidak terduga	250,000,000	125,000,000	(125,000,000)	(50.00)
2.1.9	Belanja Utang	0	0	0	0.00
2.2	**Belanja Langsung**	129,218,452,882	183,872,784,729	54,654,331,847	42.29
2.2.1	Belanja pegawai	29,236,081,700	25,888,946,434	(3,347,135,266)	(11.44)
2.2.2	Belanja barang dan jasa	56,389,427,746	58,878,448,840	2,489,021,094	4.41
2.2.3	Belanja modal	43,592,943,436	99,105,389,455	55,512,446,019	127.34

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp.)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
	JUMLAH BELANJA	443,419,004,994	517,671,090,554	74,252,085,560	16.74
	SURPLUS(DEFISIT)	(26,102,184,800)	(26,172,229,298)	(70,044,498)	0.26
3.	PEMBIAYAAN				
3.1	**Penerimaan Pembiayaan Daerah**	47,377,184,800	27,202,141,046	(20,175,043,754)	(42.58)
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	32,377,184,800	8,702,141,046	(23,675,043,754)	(73.12)
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0.00
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0	0	0	0.00
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0	18,500,000,000	18,500,000,000	0.00
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0	0	0	0.00
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	15,000,000,000	0	(15,000,000,000)	(100.00)
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	47,377,184,800	27,202,141,046	(20,175,043,754)	(42.58)
3.2	**Pengeluaran Pembiayaan Daerah**	21,275,000,000	1,029,911,748	(20,245,088,252)	(95.15)
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0	0.00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0	0	0	0.00
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	21,275,000,000	0	(21,275,000,000)	(100.00)
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0.00
3.2.5	Pembayaran Utang Pajak	0	1,029,911,748	1,029,911,748	0.00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	21,275,000,000	1,029,911,748	(20,245,088,252)	(95.15)
	PEMBIAYAAN NETTO	26,102,184,800	26,172,229,298	70,044,498	0.26
3.3	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	0	(0)	(0)	0.00

Meulaboh, 1 Desember 2010

BUPATI ACEH BARAT
WAKIL BUPATI

FUADRI